



PEMERINTAH KABUPATEN
JOMBANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Tahun 2024-2026

BKPSDM

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 137 Jombang
(0321) 862086 - Fax. 877010



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas curahan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita masih bisa terus berkarya untuk kemajuan Kabupaten Jombang. Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang periode 2024-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten selama 3 (tiga) tahun ke depan sebagai amanah dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir tahun 2023, yaitu dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 bagi Kabupaten dan Rencana Strategis Tahun 2024-2026 bagi Perangkat Daerah. Kedudukan dokumen RPD sama dengan RPJMD namun tidak memuat visi dan misi Bupati terpilih. Dokumen RPD dan Renstra menjadi landasan dalam penyusunan RKPD dan Renja tahunan Perangkat Daerah.

Penyusunan dokumen Renstra ini merupakan tindaklanjut dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan permasalahan, isu strategis serta hasil evaluasi pelaksanaan kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang periode sebelumnya. Dokumen Renstra memperhatikan sinkronisasi dan keselarasan Tujuan, Sasaran dan Program Perangkat Daerah dengan Tujuan, Sasaran dan Program pada Pembangunan Daerah dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Dokumen Renstra ini diharapkan menjadi pedoman bagi semua komponen unit kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Komitmen dan kerjasama yang baik segenap pegawai di lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang

sangat diperlukan dalam menjamin terwujudnya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama 3 (tiga) tahun kedepan.

Jombang, Juni 2023

**Kepala Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Jombang**



BAMBANG SUNTOWO, SE., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19670904 199202 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARii

DAFTAR ISIiv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. LATAR BELAKANG..... 1

1.2. LANDASAN HUKUM 3

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN..... 6

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH..... 10

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 11

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH..... 28

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH..... 33

2.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN 58

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.... 59

3.1. PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 59

3.2. ISU STRATEGIS 60

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 62

4.1. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 64

4.2. CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH..... 65

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 75

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN 78

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 93

7.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH..... 94

7.2. INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) PERANGKAT DAERAH..... 95

BAB VIII PENUTUP 97

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan aparatur negara mencakup aspek yang luas. Dimulai dari peningkatan fungsi utama pemerintahan, kelembagaan yang efektif dan efisien dengan tata laksana yang jelas dan transparan dilaksanakan oleh sumber daya manusia aparatur yang profesional serta memiliki akuntabilitas kepada mitra kerja (stakeholders). Pendayagunaan aparatur pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan dan pengendalian manajemen pemerintahan secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur negara dalam rangka menuju tata pemerintahan yang baik (good governance). Upaya reformasi aparatur salah satunya ditempuh dengan penataan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Dalam kurun waktu tiga tahun sebagai jangka menengah daerah dalam upaya pengembangan kepegawaian dilaksanakan dengan penyempurnaan manajemen kepegawaian, peningkatan penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengawasan dan pengendalian kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta pembangunan sistem informasi manajemen kepegawaian.

Masyarakat saat ini menuntut adanya peningkatan pelayanan prima atas kinerja pemerintah melalui berbagai kebijakan yang dilakukannya. Sebagai upaya untuk menjawab tuntutan masyarakat tersebut, maka diperlukan upaya yang mengarah pada penciptaan kondisi Sistem Manajemen Kepegawaian yang mampu mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional sebagaimana nilai dasar atau *core value* ASN “BERAKHLAK” (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal Adaptif dan Kolaboratif yang telah dikeluarkan oleh Kementerian PANRB dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka meningkatkan Kinerja Birokrasi yang pada akhirnya mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat/aparatur. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pelaksanaan tugas

dan fungsi harus dilandasi dengan tujuan serta strategi yang secara jelas dirumuskan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Agar sumber daya aparatur tersebut dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, diperlukan perencanaan yang matang dalam pengelolaan manajemen kepegawaian.

Perencanaan harus memperhatikan permasalahan, isu strategis serta tingkat capaian kinerja. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang sebagaimana Peraturan Bupati Jombang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai bentuk penjabaran operasional tujuan, sasaran dan program Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia disamping berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 juga harus memperhatikan Renstra Kementerian serta Provinsi. Hal ini sesuai dengan amanat pelaksanaan dari ketentuan dimaksud yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Dalam Pasal 342 ayat 4 (empat) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan dokumen perencanaan periode 3 (tiga) tahun kedepan, didalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan

pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang melaksanakan fungsi administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah serta bersifat indikatif. Selain itu, juga memberikan gambaran perwujudan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selama 3 (tiga) tahun, serta merupakan komitmen Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir tahun 2023.

Disamping itu pada penyajian BAB berikutnya juga disajikan kutipan Renstra kementerian dan lembaga yang berkaitan dan mempunyai keseragaman dalam urusan kinerja dengan perangkat daerah agar terdapat keselarasan kinerja secara regional dan nasional, dalam hal ini urusan manajemen pengelolaan sumberdaya Aparatur Sipil Negara atau ASN.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 mengacu pada yaitu: 1) landasan idiil Pancasila, 2) landasan konstitusional UUD 1945, serta 3) landasan operasional, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir tahun 2023;
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang;

- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
- 23. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2021-2041;
- 24. Peraturan Bupati Jombang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang;
- 25. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026;
- 26. Surat Bupati Jombang Nomor 050/8051/415.42/2022 tanggal 12 Oktober 2022 perihal Penyusunan Dokumen Renstra Perangkat Daerah tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud:

- a) Sebagai penjabaran secara operasional Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang dituangkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b) Memberikan arahan bagi seluruh jajaran pejabat dan staf dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas dan pelayanannya kepada masyarakat.
- c) Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya target kinerja dalam Rencana Pembangunan Daerah.

- d) Mewujudkan keadaan yang diinginkan pada tahun mendatang dalam urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Jombang.

1.3.2. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 adalah:

- a) Menyediakan satu acuan resmi bagi BKPSDM Kabupaten Jombang dalam menentukan prioritas program/kegiatan/sub kegiatan tahunan yang bersumber dari APBD;
- b) Menyediakan satu tolok ukur untuk pengendalian dan evaluasi kinerja tahunan BKPSDM Kabupaten Jombang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terkait kedudukannya sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- c) Mengoptimalkan keterpaduan dan sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja BKPSDM;
- d) Mendukung seluruh jajaran BKPSDM Kabupaten Jombang dalam memahami arah kebijakan dan program/kegiatan operasional tahunan untuk kurun waktu 3 tahun;
- e) Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan pada masing–masing Bidang di BKPSDM Kabupaten Jombang.
- f) Memberikan arahan dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 mendasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta Surat Edara Bupati Jombang tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rensta Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, terdiri atas :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- 2.2. Sumber Daya Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan
- 2.5. Mitra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Pemberian Pelayanan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Permasalahan Pelayanan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 3.2. Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 4.2 Cascading Kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

BAB VII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tuntutan pelayanan publik di era globalisasi sekarang ini yang menjadi harapan dan dambaan masyarakat sekaligus merupakan gambaran terhadap kualitas kinerja birokrasi pemerintahan. Usaha dalam melakukan perbaikan kinerja pelayanan dalam bidang kepegawaian secara berkelanjutan terus ditingkatkan, baik pada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada pada Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang maupun pada masyarakat.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2020, maka BKPSDM melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, BKPSDM masuk dalam perumpunan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi mengacu pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang. Lembaga Teknis Daerah ini dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197), pasal 15 disebutkan bahwa nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan untuk tingkatan Kabupaten/Kota adalah Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Hal ini didukung pula dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), disebutkan bahwa nomenkaltur Perangkat Daerah untuk urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia.

Sebagai tindaklanjut dari Peraturan dimaksud, pada tanggal 12 Juli 2021 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang. Dalam Perda tersebut dijelaskan bahwa nomenklatur Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan berubah menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana ketentuan dalam BAB III Pasal 3 dan mengalami perubahan fungsi, dari fungsi penunjang kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan menjadi melaksanakan administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah. Dalam melaksanakan fungsinya dimaksud Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;

- 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- 4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Struktur Organisasi

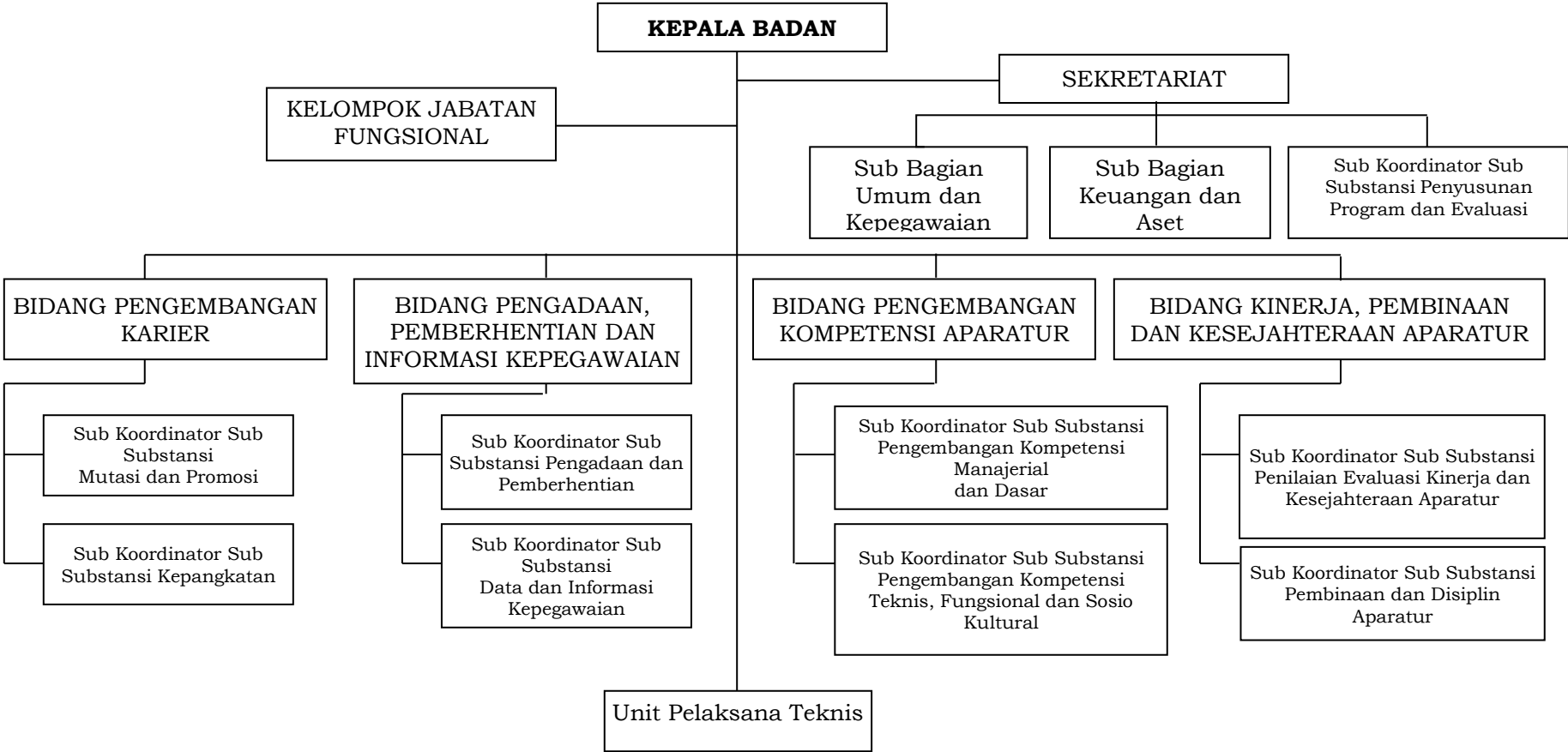
Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang sebagaimana Peraturan Bupati Jombang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Koordinator Sub Substansi Penyusunan Program dan Evaluasi.
- c. Bidang Pengembangan Karir, membawahi:
 - 1. Sub Koordinator Sub Substansi Mutasi dan Promosi; dan
 - 2. Sub Koordinator Sub Substansi Kepangkatan.
- d. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, membawahi:
 - 1. Sub Koordinator Sub Substansi Pengadaan dan Pemberhentian; dan
 - 2. Sub Koordinator Sub Substansi Data dan Informasi Kepegawaian.
- e. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, membawahi:
 - 1. Sub Koordinator Sub Substansi Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Dasar; dan
 - 2. Sub Koordinator Sub Substansi Pengembangan Kompetensi Teknis Fungsional dan Sosio Kultural.
- f. Bidang Kinerja, Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur, membawahi:

- 1. Sub Koordinator Sub Substansi Penilaian Evaluasi Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur; dan
- 2. Sub Koordinator Sub Substansi Pembinaan dan Disiplin Aparatur.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis.

Adapun bagan susunan organisasi mengacu pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang sebagaimana tersaji dalam Gambar 2.1.

Gambar 2.1
Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Jombang



Selanjutnya rincian deskripsi tugas pokok tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia.

2. Sekretariat

Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset, penyusunan program dan evaluasi; Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Pengelolaan administrasi aset Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- f. Pengelolaan urusan rumah tangga;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;

- i. Pengelolaan kearsipan;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Adapun Sekretariat membawahi:

2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan koordinasi, pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan kebijakan teknis dan operasional;
- b. Melaksanakan administrasi kepegawaian, pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier pegawai;
- c. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga kantor, keprotokolan, perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
- d. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor;
- e. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- f. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- g. Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas;
- h. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur;
- i. Menyusun Standart Pelayanan Minimal Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- j. Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.2. Sub Bagian Keuangan dan Aset, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/ pembukuan, pertanggung-jawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- b. Melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, perpindahan pegawai dan ganti rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
- c. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran;
- d. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang-barang inventaris kantor;
- e. Melaksanakan penatausahaan, pengelolaan dan pelaporan aset;
- f. Melaksanakan peningkatan kesejahteraan Pegawai; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.3. Sub Koordinator Sub Substansi Penyusunan Program dan Evaluasi, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menghimpun, mengolah, mengkaji dan meneliti data dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan penyusunan dokumen pembangunan bidang kepegawaian daerah;
- c. Melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka analisis dan penilaian pelaksanaan program dan anggaran;
- e. Melaksanakan kebijakan pembinaan, pengawasan, pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

- f. Melaksanakan pembuatan umpan balik hasil penyusunan dan penetapan anggaran guna perencanaan program dan anggaran untuk tahun berikutnya;
- g. Melaksanakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;

3. Bidang Pengembangan Karir

Bidang Pengembangan Karir mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dibidang Pengembangan Karir. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pengembangan Karir mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi manajemen kepegawaian bidang mutasi, promosi dan kepangkatan;
- b. Penyusunan kebijakan mutasi dan promosi;
- c. Penyelenggaraan proses mutasi dan promosi;
- d. Pelaksanaan verifikasi dokumen mutasi dan promosi;
- e. Pemrosesan Kenaikan Pangkat, Surat Kenaikan Gaji Berkala, Impassing Gaji dan peninjauan masa kerja;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan mutasi, promosi dan kepangkatan;
- g. Pelaksanaan mutasi dan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- h. Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas dan pejabat fungsional;
- i. Penyusunan manajemen talenta dan rencana suksesi;
- j. Penyusunan penetapan pola karir;
- k. Penyusunan kebijakan pengisian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas;

- l. Pelaksanaan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- m. Pelaksanaan uji kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- n. Pengelolaan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional;
- o. Pelaksanaan pelayanan administrasi ijin/tugas belajar dan pencantuman gelar akademik/peningkatan pendidikan; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Bidang Pengembangan Karir membawahi:

- 3.1. Sub Koordinator Sub Substansi Mutasi dan Promosi, mempunyai tugas:
 - a. Memproses mutasi Pegawai Negeri Sipil antar daerah/instansi;
 - b. Merencanakan dan memproses mutasi Pegawai Negeri Sipil antar Perangkat Daerah;
 - c. Memproses Pegawai Negeri Sipil yang bekerja diluar instansi induk;
 - d. Merencanakan dan memproses, mutasi dan promosi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas;
 - e. Memproses usulan perubahan jabatan pelaksana;
 - f. Memproses pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Fungsional;
 - g. Melaksanakan seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - h. Melaksanakan penilaian kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam rangka mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - i. Melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan;
 - j. Menyusun dan mengevaluasi kebijakan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas;
 - k. Menyusun dan mengevaluasi pedoman pola karier;
 - l. Menyusun dan mengevaluasi manajemen talenta dan rencana suksesi;
 - m. Melakukan evaluasi pelaksanaan pengembangan karier;

- n. Menyusun profil Aparatur Sipil Negara;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Karier.

3.2. Sub Koordinator Sub Substansi Kepangkatan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan koordinasi kenaikan pangkat dengan instansi terkait;
- b. Membuat daftar penjaminan kenaikan pangkat;
- c. Memproses berkas kenaikan pangkat;
- d. Mengevaluasi kenaikan pangkat;
- e. Memproses Surat Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil;
- f. Memproses impassing gaji Pegawai Negeri Sipil;
- g. Memproses peninjauan masa kerja Pegawai Negeri Sipil;
- h. Melaksanakan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- i. Menyelenggarakan pengembangan kompetensi melalui program tugas belajar;
- j. Melaksanakan pelayanan administrasi izin/tugas belajar dan pencantuman gelar akademik/peningkatan pendidikan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Karir.

4. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dibidang perencanaan, pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan bahan kebijakan pengadaan, pemrosesan, pensiun dan data informasi kepegawaian;
- b. Menyusun rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan Aparatur Sipil Negara;
- c. Menyelenggarakan pengadaan Aparatur Sipil Negara;
- d. Menyelenggarakan pembekalan Calon Pegawai negeri Sipil;
- e. Menyelenggarakan pengambilan sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil;
- f. Mengkoordinasikan pengangkatan dan pensiun Aparatur Sipil Negara;
- g. Mengkoordinasikan fasilitasi pembekalan, administrasi gaji pensiun pertama dan klaim taspen purna tugas pegawai;
- h. Mengkoordinasikan pengelolaan informasi kepegawaian;
- i. Mengkoordinasikan penyusunan sistem informasi kepegawaian;
- j. Mengevaluasi kegiatan pengadaan, pemrosesan, pensiun dan pengelolaan informasi kepegawaian;
- k. Melaksanakan kajian kebijakan pengadaan, pensiun dan pengelolaan informasi;
- l. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian membawahi :

4.1. Sub Koordinator Sub Substansi Pengadaan dan Pemberhentian, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan pegawai berdasarkan hasil analisa kebutuhan pegawai, analisa jabatan dan peta jabatan;
- b. Merencanakan pengadaan Aparatur Sipil Negara;
- c. Menyusun persyaratan, norma, prosedur dalam pengadaan Aparatur Sipil Negara;
- d. Menyiapkan penyelenggaraan pembekalan dan wawasan calon Pegawai Negeri Sipil;

- e. Menyiapkan pemrosesan pengangkatan dan pensiun Aparatur Sipil Negara;
- f. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan pengadaan pemberhentian Aparatur Sipil Negara;
- g. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembekalan, administrasi gaji pensiun pertama dan klaim taspen purna tugas pegawai;
- h. Memproses administrasi kartu pegawai, kartu taspen dan kartu suami/istri;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian;

4.2. Sub Koordinator Sub Substansi Data dan Informasi Kepegawaian, mempunyai tugas;

- a. Melaksanakan perencanaan, pengembangan dan pembangunan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi;
- b. Melaksanakan koordinasi pengelolaan dan pengolahan data informasi ASN berbasis teknologi informasi;
- c. Melaksanakan monitoring, pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan sistem informasi kepegawaian;
- d. Melaksanakan administrasi/usul status dan kedudukan kepegawaian;
- e. Melakukan penyusunan data kepegawaian, verifikasi, klarifikasi, pemutakhiran data kepegawaian ASN;
- f. Menyediakan informasi kepegawaian secara elektronik untuk instansi vertikal/organisasi perangkat daerah/unit kerja;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian.

5. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur

Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dibidang pengembangan kompetensi Aparatur. Dalam

melaksanakan tugas pokok, bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan perumusan kebijakan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
- b. Penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
- c. Perencanaan assesment/penilaian dan sertifikasi kompetensi Aparatur Sipil Negara;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama assesment/penilaian dan sertifikasi kompetensi Aparatur Sipil Negara;
- f. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
- g. Pelaksanaan assesment/penilaian dan sertifikasi kompetensi Aparatur Sipil Negara;
- h. Pelaksanaan pelatihan dasar/prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- i. Penyelenggaraan penguatan kompetensi Teknis Bidang Tugas Calon Pegawai Negeri Sipil;
- j. Penyusunan profil/pemetaan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
- k. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur membawahi :

- 5.1. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Dasar, mempunyai tugas:
 - a. Menyusun bahan perumusan kebijakan pengembangan kompetensi manajerial Aparatur Sipil Negara;

- b. Menyusun kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi manajerial Aparatur Sipil Negara dan Pelatihan Dasar /Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama pengembangan kompetensi manajerial dan latsar/prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Menyelenggarakan pengembangan kompetensi manajerial Aparatur Sipil Negara;
 - e. Melaksanakan pelatihan dasar/prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - f. Melaksanakan penguatan kompetensi teknis bidang tugas Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - g. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengembangan kompetensi manajerial Aparatur Sipil Negara dan pelatihan dasar/prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
- 5.2. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, Fungsional dan Sosio Kultural mempunyai tugas:
- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan pengembangan kompetensi teknis fungsional dan sosial kultural Aparatur Sipil Negara;
 - b. Menyusun kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi teknis, fungsional dan sosial kultural;
 - c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama pengembangan kompetensi teknis, fungsional dan sosio kultural;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama pengembangan kompetensi teknis, fungsional dan sosio kultural;
 - e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama assesment/penilaian dan sertifikasi kompetensi Aparatur Sipil Negara;
 - f. Menyelenggarakan pengembangan kompetensi teknis, fungsional dan sosio kultural Aparatur Sipil Negara;

- g. Melaksanakan assessment/penilaian dan sertifikasi Aparatur Sipil Negara.
- h. Menyusun profil/pemetaan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
- i. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengembangan kompetensi teknis, sosio kultural dan assesment/penilaian dan sertifikasi kompetensi Aparatur Sipil Negara; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur.

6. Bidang Kinerja, Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur

Bidang Kinerja, Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur dipimpin oleh Kepala Bidang Kinerja, Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dibidang Kinerja, Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Kinerja, Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan penilaian kinerja, disiplin, pemberhentian dan penghargaan Aparatur Sipil Negara;
- b. Perencanaan pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja, disiplin, pemberhentian, pembinaan dan penghargaan Aparatur Sipil Negara;
- c. Penyusunan Metode Penilaian Kinerja;
- d. Pengkoordinasian kegiatan Penilaian Kinerja, Disiplin, Pembinaan dan Penghargaan;
- e. Pelaksanaan evaluasi pelaporan dan tindaklanjut penilaian kinerja dan pembinaan;
- f. Pelaksanaan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin dan ijin perkawinan/perceraian;
- g. Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
- h. Fasilitasi Pembinaan Profesi Pegawai Negeri Sipil;

- i. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan LHKPN;
- j. Pelaksanaan Pengelolaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN;
- k. Pelaksanaan pemberhentian sementara dari jabatan negeri;
- l. Menyusun dan memproses usulan pemberian penghargaan Aparatur;
- m. Fasilitasi administrasi Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja/Jaminan Kematian (JKK/JKM);
- n. Pemrosesan administrasi pemberian ijin cuti Aparatur Sipil Negara;
- o. Pelaksanaan Senam Aparatur Sipil Negara;
- p. Fasilitasi pemeriksaan kesehatan Aparatur Sipil Negara;
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Bidang Kinerja, Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur, membawahi:

6.1. Sub Bidang Penilaian, Evaluasi Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur, yang mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur;
- b. Menyusun indikator penilaian kinerja Aparatur;
- c. Menganalisa hasil penilaian kinerja Aparatur;
- d. Mengevaluasi, melaporkan dan menindaklanjuti hasil evaluasi penilaian kinerja Aparatur;
- e. Melaksanakan sosialisasi terkait Penilaian Kinerja Aparatur;
- f. Pemberian penghargaan ASN dan tanda jasa Satya Lencana Karya Satya;
- g. Penyelenggaraan fasilitasi administrasi Jaminan Kecelakaan Kerja/Jaminan Kematiaan (JKK/JKM);
- h. Melaksanakan administrasi pemeriksaan kesehatan PNS;
- i. Menyelenggarakan pelaksanaan senam pagi;
- j. Memproses Izin Cuti pegawai Aparatur Sipil Negara;

- k. Fasilitasi kegiatan organisasi Profesi Pegawai Negeri Sipil; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penilaian Kinerja dan Pembinaan Aparatur.

6.2. Sub. Bidang Pembinaan dan Disiplin Aparatur, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan evaluasi disiplin Aparatur Sipil Negara;
- b. Melaksanakan pembinaan kepegawaian dalam pelanggaran tindak pidana;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi penegakan disiplin dan pengawasan Aparatur Sipil Negara;
- d. Melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Aparatur Sipil Negara yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
- e. Menyiapkan bahan pemrosesan penyelesaian permohonan izin perkawinan atau perceraian Aparatur Sipil Negara;
- f. Memverifikasi dan mengevaluasi tingkat kehadiran Aparatur Sipil Negara;
- g. Mengelola dan melaporkan LHKPN;
- h. Melaksanakan penginputan data. Pengolahan dan menyusun laporan pengukuran Indeks Profesional ASN;
- i. Memproses pemberhentian PNS yang menjadi anggota/pengurus partai politik;
- j. Memproses pemberhentian sementara dari jabatan negeri;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penilaian Kinerja dan Pembinaan Aparatur.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Terkait pengaturan tugas pokok dan fungsi kelompok jabatan fungsional diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang telah diubah dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2010 Tentang Perubahan. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai Peraturan Bupati Jombang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dikoordinir oleh tenaga fungsional senior sesuai dengan bidang keahliannya. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sampai dengan akhir Maret 2023, jumlah pejabat fungsional di BKPSDM sebanyak 11 sebelas orang yang terdiri atas pejabat fungsional ahli pertama sebanyak 5 dan ahli muda sebanyak 6 orang.

2.2. Sumber Daya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

2.2.1 Kepegawaian/Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan unsur dinamisator yang terpenting dalam suatu organisasi. Kemampuan sumberdaya ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat pendidikan. Berikut merupakan gambaran komposisi pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang saat ini bila ditinjau dari tingkat Golongan, Jabatan dan Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4. Komposisi Menurut Golongan/Kepangkatan

No.	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Pegawai
1	Golongan IV	4	3	7 orang
2	Golongan III	15	12	27 orang
3	Golongan II	4	3	7 orang

No.	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Pegawai
4	Golongan I	1	0	1 orang
5	Tenaga Kontrak	1	0	1 orang
Jumlah		25	18	43 orang

Dari tabel tingkat golongan tersebut dapat terbaca, bahwa tingkat golongan dari personil BKPSDM yang terbanyak adalah golongan III, sebanyak 27 orang (63 % dari seluruh PNS).

Tabel 2.5. Komposisi Pegawai Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Pegawai
1	Eselon II	1	0	1 orang
2	Eselon III	3	2	5 orang
3	Eselon IV	-	2	2 orang
4	Fungsional Tertentu	7	4	11 orang
5	Fungsional Umum	19	10	29 orang
6	Tenaga Kontrak	1	-	1 orang
Jumlah		25	18	43 orang

Pada tahun 2023 fungsional tertentu Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang berjumlah 11 orang, 6 adalah fungsional murni dan 5 merupakan fungsional hasil penyetaraan sebagaimana amanah dari Permen PAN/RB.

Tabel 2.6. Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan

Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Pegawai
SD	1	0	1 orang

Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Pegawai
SLTP	1	0	1 orang
SLTA	2	2	4 orang
Diploma (D3)	3	2	5 orang
Sarjana (S1/D4)	8	9	17 orang
Magister (S2)	10	5	15 orang
Jumlah	25	18	43 orang

Berdasarkan tabel tingkat pendidikan diatas, dapat terbaca bahwa tingkat pendidikan dari pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang mayoritas diatas sarjana sebanyak 32 orang atau 74,42%. Terbanyak berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 17 orang atau 39,54%, dan berbeda tipis dengan pegawai yang berpendidikan S2 sebanyak 15 orang atau 34,88%.

2.2.2 Aset / Modal

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menempati gedung kantor sendiri meskipun dalam satu lingkungan dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang. Sampai saat ini peralatan dan perlengkapan kantor yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8. Inventaris Barang

No.	Nama/ Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6
I	Kendaraan Dinas Jabatan				
1	Kendaraan Dinas R4	4	4		

No.	Nama/ Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
2	Kendaraan Dinas R2	26	24		2
II	Perlengkapan Gedung Kantor				
1	Pompa air	2	1	1	
2	Almari besi	3		3	
3	Lemari kayu	32			
4	Rak kayu	9	9		
5	Filing cabinet/besi	19	19		
6	brankas	1	1		
7	Rotari filing1	1			
8	Alat penghancur kertas	2	2		
9	Mesin Absensi	7	4		3
10	Papan nama instanasi	2	2		
11	Papan pengumuman	3	3		
12	Alat kantor lainnya	5	5		
13	Meja kerja kayu	1	1		
14	Meja rapat	14	14		
15	Meja resepsionis	3	3		
16	Meja panjang	1	1		
17	Meja bundar	8	8		
18	Meja ½ biro	36	36		
19	Meja makan besi	4	4		
20	Kursi rapat	73	73		
21	Kursi tamu	5	5		
22	Kursi biasa	21	21		
23	Kursi lipat	25	25		
24	Meja komputer	17	17		
25	Meubelair lainnya	1	1		
26	Mesin penghisap debu	4	3		1
27	Mesin pemotong rumput	2	1	1	
28	Lemari Es	1	2		
29	AC Window	5	5		
30	AC Split	23	23		
31	Kipas angin	4	4		
32	Exhause fan	2	2		

No.	Nama/ Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
33	Televisi	9	4	5	
34	Tape recorder	2	1	1	
35	Sound sytem	2	2		
36	Wire less	1	1		
37	Tangga aluminium	1	1		
38	dispenser	1	1		
39	Gordyn/kray	3	3		
40	Bracket standing	2	2		
41	Alat rumah tangga lain	2	2		
42	Alat pemadam portable	4	4		
43	Meja Kerja Pejabat Eselon II	3	3		
44	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	4		
45	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12	12		
46	Meja tamu biasa	2	2		
47	Kursi kerja pejabat eselon II	1	1		
48	Kursi kerja pejabat eselon III	1	1		
49	Kursi kerja pejabat eselon IV	11	11		
50	Microphone/ wireless mic	1	1		
51	Camera elektronik	4	4		
52	Layar film/projector	5	3	1	1
53	Video converence	2	2		
54	Telephone PABX	6	5	1	
55	Telephone mobil	1	1		
56	faximile	1	1		
57	Exhause fan	2	2		
58	dispencer	3			3
59	Alat khusus keamanan lainnya	5	5		
60	PC unit	22	19	3	
61	Lap top	21	18	3	
62	notebook	15	14	1	

No.	Nama/ Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
63	CPU /peralatan minframe	1	1		
64	Hard disk	1	1		
65	Printer	44	38	3	3
66	Scanner	7	6	1	
67	Server	2	2		
68	Router	10	10		
69	Hub	1		1	
70	Netware interface internal	2	2		
71	Peralatan jaringan lainnya	2	2		
72	Peralatan computer lainnya	5	3		2

Selain sarana dan prasarana tersebut, terdapat sarana yang sangat mendukung proses pengelolaan manajemen kepegawaian yaitu Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan (SIAP ASN) yang memberi kemudahan dalam proses administrasi kepegawaian di Pemerintah Kabupaten Jombang. Sedangkan sarana untuk pendidikan dan pelatihan ASN saat ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia masih melakukan sewa.

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilihat melalui tabel 2.9. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada periode tahun 2018-2023 dengan menggunakan indikator sebagai tolak ukur standart capaian. Tabel 2.9 menampilkan target dan realisasi berdasarkan indikator-indikator tersebut sehingga dapat dilihat tingkat perolehan capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sebagai berikut :

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Badan Kepegawaian dan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan administrasi perkantoran				90%	92%				100%	100%				102,22%	100,00%			
	Jumlah pemenuhan jasa admistrasi teknis perkantoran				2 orang	2 orang				2 orang	0				100,00%	0,00%			
	jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran				25 jenis	25 jenis				25 jenis	26 jenis				100,00%	104,00%			
	Persentase sarana prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan				90%	90%				93%	95%				103,33%	105,56%			
	Jumlah unit gedung baru yang dibangun				-	2 unit, gedung Diklat dan Gedung CAT				0,00	0				0,00%	0,00%			
	Jumlah pengadaan sarana prasarana gedung kantor				18 unit	14 jenis (sarana gedung BKDPP, diklat dan gedung CAT)				18 unit	11				100,00%	78,57%			
	Jumlah pemeliharaan gedung kantor				5 jenis (utama cat genting)	4 jenis (utama rehab front officer)				2 jenis	4				40,00%	100,00%			
	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara				4 jenis	4 jenis				73 unit	19				100,00%	100,00%			
	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara				28	29				27 unit	14				96,43%	48,28%			
	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya				50	100				49 stel	0				98,00%	0,00%			
	Persentase dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu				95%	97%				67%	100%				70,53%	103,09%			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah dokumen Renstra				0	1				0,00	0				0,00%	0,00%			
	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun				6	6				2,00	2				33,33%	33,33%			
	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan dokumen SAKIP yang tersusun.				6	6				6,00	6				100,00%	100,00%			
	Jumlah dokumen SOP, SPIP dan IKM				3	-				2,00	3				66,67%	100,00%			
	Jumlah dokumen laporan keuangan				2	2				2,00	2								
	Persentase aparatur yang diusulkan sanksi hukuman disiplin				0.55 %	0.50 %				0,50%	0,34%				110,00%	147,06%			
	Jumlah jenis layanan administrasi kesejahteraan aparatur				7 layanan	0				7 layanan					100,00%				
	Jumlah jenis layanan administrasi kesejahteraan aparatur				0	8 layanan					7 layanan					87,50%			
	Jumlah Dokumen monitoring pembinaan disiplin				5 dokumen	0				4 dokumen					80,00%				
	Jumlah Dokumen monitoring pembinaan disiplin				0	5 dokumen					6 dokumen					120,00%			
	Jumlah dokumen laporan kinerja aparatur				6 dokumen	6 dokumen				5	4 dokumen				83,33%	66,67%			
	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan				2 kegiatan	2 kegiatan				2	0				100,00%	0,00%			
	Persentase berkas usulan formasi yang terverifikasi				100%	100%				100%	100%				100,00%	100,00%			
	Jumlah CPNS yang diproses				428	0				419,00					97,90%				
	Jumlah CPNS yang diproses				0	450				0,00	314 orang					69,78%			
	Jumlah dokumen informasi data kepegawaian.				4 dokumen	4 dokumen				4 dokumen	4 dokumen				100,00%	100,00%			
	Persentase dokumen / arsip kepegawaian yang terkelola.				95%	95%				95%	95%				100,00%	100,00%			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah usulan formasi OPD				65 OPD	69 OPD				65 OPD	65 OPD				100,00%	94,20%			
	Jumlah SK jabatan fungsional yang diproses				700 SK	600 SK				664 SK	741				94,86%	123,50%			
	Persentase aparatur yang mendapatkan layanan karir kepegawaian pada tahun berkenaan				95%	96%				94%	101,49%				98,95%	105,72%			
	Jumlah dokumen inventarisasi mutasi pegawai				5 dokumen	5 dokumen				5 dokumen	5 dokumen				100,00%	100,00%			
	Jumlah SK kenaikan pangkat yang diusulkan				1500	1400				1173,00	1378				78,20%	98,43%			
	Jumlah surat kenaikan gaji berkala PNS yang diterbitkan.				4625	3850				4633,00	3945				100,17%	102,47%			
	Jumlah SK pensiun yang diusulkan tepat waktu				540	577				545,00	606				100,93%	105,03%			
	Persentase aparatur yang lulus diklat				100%	100%				70%	100%				70,00%	100,00%			
	Jumlah PNS yang diberikan bantuan tugas belajar				2 org	2 org				2 org	2 org				100,00%	100,00%			
	Jumlah peserta diklat prajabatan yang dikirim				427 org	450 org				314 org	105 org				73,54%	0,23%			
	Jumlah peserta diklatpim IV, III, dan II				40, 2 orang	40, 4, 4				42 org	4 org				100,00%	8,33%			
	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat teknis fungsional (bimtek SIAP ASN)				70 org	186 org				195 org	100 org				278,57%	0,54%			
	Jumlah aparatur perwakilan OPD yang mengikuti APKP dan EDD				70 org	145 org				70 org	70 org				100,00%	48,28%			
	Jumlah aparatur perwakilan OPD yang mengikuti APKP dan EDD				75 org, 9 JPTP, 45 ass. JPTP	3 org. JPTP				422 org	70 org				327,13%	2333,33%			
	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur BKDPP						90%					90%					100%		
	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan.						100%					100%					100%		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah draf dokumen Renstra Perubahan 2018-2023 tersusun						1					1					100%		
	Jumlah dokumen renja yang tersusun.						2					2					100%		
	Jumlah dokumen perencanaan anggaran yang tersusun.						2					2					100%		
	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja, pengendalian kinerja, dokumen SAKIP, dan dokumen kinerja lainnya yang disusun						10					10					100%		
	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu						98%					82,91%					84,60%		
	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan						100%					100%					100%		
	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup BKDPP yang di fasilitasi						14 kali					14 kali					100%		
	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun PD						2					2 dok					100%		
	Jumlah dokumen laporan keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran PD						12					12 dok					100%		
	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran						100%					100%					100%		
	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi						4 jenis					4 jenis					100%		
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi						4 jenis					3 jenis					75%		
	Jumlah peralatan rumah tangga PD yang terfasilitasi						6 jenis					-					-		
	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi						11 kali					11 kali					100%		
	Jumlah distribusi BBM yang terfasilitasi.						12 bulan					12 bulan					100%		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah pemenuhan barang cetak						2500 lembar					2421 lembar					96,84%		
	Jumlah pemenuhan barang penggandaan						240 buku					214 buku					89,17%		
	Jumlah pemenuhan bahan bacaan						3 jenis					3 jenis					100%		
	Jumlah pemenuhan pelaksanaan perjalanan dinas dalam dan luar daerah untuk koordinansi dan rapat						12					12 bulan					100%		
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah						100%					100%					100%		
	Jumlah jenis belanja persuratan yang tercukupi						3					3 jenis					100%		
	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi						12 bulan					12 bulan					100%		
	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum						4 jenis					4 jenis					100%		
	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur						0					-					100%		
	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor						0					-					100%		
	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik						95%					95%					100%		
	1. Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara .						1 unit					1 unit					100%		
	2. Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dibayarkan pajaknya						1 unit					1 unit					100%		
	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara .						29 unit					26 unit					89,66%		
	2. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dibayarkan pajaknya						29 unit					26 unit					89,66%		
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara						0					98%					98%		
	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara						110					2					100%		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD.						100%					-					-		
	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi						0					-					-		
	Indeks kualitas ASN						0,84					0,85					101,19%		
	1. Persentase pelanggaran disiplin ASN tahun berkenaan.						0,20%					0,18%					110%		
	2.Persentase ASN yang memperoleh penghargaan.						98%					-					-		
	Jumlah SKP ASN yang terverifikasi						8563					8148					95,15%		
	1. Jumlah surat izin cuti, Karpeg,Karis/Karsu,Klim Taspen, Satya Lancana dan JKK/JKM yg diterbitkan.						1838					1975					107,45%		
	2.1 Persentase seleksi aparatur berprestasi yang menang.						2%					3 orang					100%		
	2.2 Jumlah kegiatan senam ASN						10					6 kali					60%		
	2.3 Jumlah ASN yang difasilitasi pemeriksaan kesehatan						24					10 orang					41.67%		
	Jumlah ASN yang dikenakan hukuman disiplin						18					18 orang					100%		
	Persentase usulan formasi yang diusulkan ke Kemenpan.						80%					80%					100%		
	Jumlah dokumen penyusunan kebutuhan pegawai ASN						1 dokumen					1 dok					100%		
	Jumlah kegiatan proses pengadaan ASN						3 keg.					3 keg					100%		
	Jumlah pengembangan modul sistem informasi kepegawaian						2 modul					2 modul					100%		
	Jumlah SK Pensiun yang didistribusikan tepat waktu						490 SK					602 SK					122.86%		
	Persentase ASN yang mendapatkan layanan mutasi, promosi dan Kenaikan Pangkat.						82%					96,87%					118.13%		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1. Jumlah surat permintaan persetujuan pindah/persetujuan pindah antar daerah yg diproses.						23					24 surat					104.35%		
	2. Jumlah keputusan pemberhentian PNS dari JP, JA, dan JPTP yg diproses.						5					3 SK					60%		
	3. Jumlah keputusan mutasi staf yang diproses.						125					184 SK					147.2%		
	4. Jumlah surat ijin/SK PNS yang bertugas pada instansi lain yg diproses.						3					-					-		
	1. Jumlah SK kenaikan pangkat yang diusulkan						1300					1287 SK					99%		
	2. Jumlah surat kenaikan gaji berkala ASN yang diterbitkan.						4058					4038 SK					99.51%		
	3. Jumlah Peserta ujian dinas dan ujian KPPI yang lulus						140					-					-		
	1. Jumlah dokumen seleksi terbuka pengisian JPTP (Berita Acara Penilaian Akhir) yang diproses						2					2 dok					100%		
	2. Jumlah pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PP, PA, dan PPTP yang diproses						2					7 kali					350%		
	Persentase ASN yang mendapatkan peningkatan kompetensi						85%					100%					117.65%		
	Jumlah SK jabatan fungsional yang diproses.						520					601 SK					100%		
	1. Jumlah peningkatan kompetensi PNS melalui tugas belajar .						2 orang					2 orang					117.31%		
	2. Jumlah peningkatan kompetensi PNS melalui ljin Belajar						60 orang					74 orang					123.33%		
	3. Jumlah peningkatan kompetensi PNS melalui penambahan Gelar						30 orang					84 orang					280%		
	Nilai dimensi kompetensi pada IP ASN						18					17,66					98.11%		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Persentase aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis						100%					100%					100%		
	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis						220					320 orang					145.46%		
	Jumlah peserta AKPK dan EDD						145					145 orang					100%		
	Persentase aparatur yang lulus sertifikasi dan pengembangan kompetensi manajerial.						100%					103,82%					103.82%		
	Jumlah ASN yang mengikuti sertifikasi dan assesment / uji kompetensi						50					145 orang					290%		
	Jumlah pejabat struktural yang mengikuti PKP,PKA, dan PKN Tk.II						40					40 orang					100%		
	Jumlah CPNS peserta Latsar CPNS						340					366 orang					107.65%		
	Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan lulus dengan predikat minimal memuaskan						97%					-					-		
	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur BKPSDM							90%	91%				100.48	-				112	-
	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan.							100%	100%				110	-				110	-
	Jumlah draf dokumen Renstra Perubahan 2018-2023 tersusun							-	1				-	-					-
	Jumlah dokumen renja yang tersusun.							2	2				3	-				150	-
	Jumlah dokumen perencanaan anggaran yang tersusun.							2	2				2	-				100	-
	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja, pengendalian kinerja,dokumen SAKIP, dan dokumen kinerja lainnya yang disusun							10	10				10	-				100	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu							98%	98%			-	100	-			-	102	-
	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan							100%	100%			-	100	-			-	100	-
	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup BKDPP yang di fasilitasi							14 kali	14 kali			-	14	-			-	100	-
	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun PD							3	3			-	3	-			-	100	-
	Jumlah dokumen laporan keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran PD							9	9			-	9	-			-	100	-
	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran							100%	100%				100.21	-				100.21-	-
	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi							4 jenis	4 jenis				4	-				100	-
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi							4 jenis	4 jenis				4	-				100	-
	Jumlah peralatan rumah tangga PD yang terfasilitasi							6 jenis	6 jenis				6	-				100	-
	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi							11 kali	11 kali				11	-				100	-
	Jumlah distribusi BBM yang terfasilitasi.							12 bulan	12 bulan				12	-				100	-
	Jumlah pemenuhan barang cetak							3000 lembar	3000 lembar				255	-				8.5	-
	Jumlah pemenuhan barang penggandaan							240 buku	240 buku				92232	-				38430	-
	Jumlah pemenuhan bahan bacaan							3 jenis	3 jenis				3	-				100	-
	Jumlah pemenuhan pelaksanaan perjalanan dinas dalam dan luar daerah untuk koordinasi dan rapat							12	12				12	-				100	-
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah							100%	100%				83.33	-				833.33	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah jenis belanja persuratan yang tercukupi							2	2				1	-				50	-
	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi							12 bulan	12 bulan				12	-				100	-
	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum							4 jenis	4 jenis				3	-				75	-
	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur							100%	100%				82.35	-				82.35	-
	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor							8	8				28	-				350	-
	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik							95%	95%				100	-				105	-
	1. Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara .							1 unit	1 unit				1	-				100	-
	2. Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dibayarkan pajaknya							1 unit	1 unit				1	-				100	-
	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara .							29 unit	29 unit				29	-				100	-
	2. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dibayarkan pajaknya							29 unit	29 unit				29	-				100	-
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara							1 gedung	1 gedung				1	-				100	-
	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara							111	110				54	-				48.64	-
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD.							100%	100%				94	-				94	-
	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi							54 stel	50 stel				48	-				-	-
	Indeks kualitas ASN							0,85	0,86				0.81	-				88.88	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1. Persentase pelanggaran disiplin ASN tahun berkenaan.							0,20%	0,20%				0.35	-				175	-
	2.Persentase ASN yang memperoleh penghargaan.							98%	98%				98	-				100	-
	Jumlah SKP ASN yang terverifikasi							8563	8563				7717	-				-	-
	1. Jumlah surat izin cuti, Karpeg,KARIS/Karsu,Klim Taspen, Satya Lancana dan JKK/JKM yg diterbitkan.							2.056	2.171				2366	-				375.34	-
	2.1 Persentase seleksi aparatur berprestasi yang menang.							2%	2%				2	-				100	-
	2.2 Jumlah kegiatan senam ASN							43	42				30	-				69.76	-
	2.3 Jumlah ASN yang difasilitasi pemeriksaan kesehatan							22	23				14	-				63.63	-
	Jumlah ASN yang dikenakan hukuman disiplin							17	16				26	-				152	-
	Persentase usulan formasi yang diusulkan ke Kemenpan.							81%	82%				131	-				161,72	-
	Jumlah dokumen penyusunan kebutuhan pegawai ASN							1 dokumen	1 dokumen				1	-				100	-
	Jumlah kegiatan proses pengadaan ASN							3 keg.	3 keg.				3	-				100	-
	Jumlah pengembangan modul sistem informasi kepegawaian							1 modul	1 modul				-	-				100	-
	Jumlah SK Pensiun yang didistribusikan tepat waktu							568 SK	595 SK				568	-				100	-
	Persentase ASN yang mendapatkan layanan mutasi, promosi dan Kenaikan Pangkat.							84%	86%				82	-				97.61	-
	1. Jumlah surat permintaan persetujuan pindah/persetujuan pindah antar daerah yg diproses.							24	25				31	-				129.16	-
	2. Jumlah keputusan pemberhentian PNS dari JP, JA, dan JPTP yg diproses.							5	5				262	-				5240	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3. Jumlah keputusan mutasi staf yang diproses.							130	135				32	-				24.61	-
	4. Jumlah surat ijin/SK PNS yang bertugas pada instansi lain yg diproses.							3	3				0	-				0	-
	1. Jumlah SK kenaikan pangkat yang diusulkan							1300	1150				849	-				65.30	-
	2. Jumlah surat kenaikan gaji berkala ASN yang diterbitkan.							4789	4058				3667	-				76.57	-
	3. Jumlah Peserta ujian dinas dan ujian KPPI yang lulus							145	150				117	-				80.68	-
	1. Jumlah dokumen seleksi terbuka pengisian JPTP (Berita Acara Penilaian Akhir) yang diproses							1	1				2	-				200	-
	2. Jumlah pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PP, PA, dan PPTP yang diproses							2	2				4	-				200	-
	Persentase ASN yang mendapatkan peningkatan kompetensi							87%	90%				83.7	-				96.20	-
	Jumlah SK jabatan fungsional yang diproses.							525	530				-	-				-	-
	1. Jumlah peningkatan kompetensi PNS melalui tugas belajar .							3 orang	4 orang				2	-				66.66	-
	2. Jumlah peningkatan kompetensi PNS melalui Ijin Belajar							65 orang	70 orang				48	-				73.84	-
	3. Jumlah peningkatan kompetensi PNS melalui penambahan Gelar							35 orang	40 orang				149	-				40	-
	Nilai dimensi kompetensi pada IP ASN							19	20				17.74	-				93.36	-
	Persentase aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis							100%	100%				-	-				-	-
	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis							220	200				150.17	-				68.25	-
	Jumlah peserta AKPK dan EDD							145	150				145	-				100	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Persentase aparatur yang lulus sertifikasi dan pengembangan kompetensi manajerial.							100%	100%				97.05	-				97.05	-
	Jumlah ASN yang mengikuti sertifikasi dan assesment / uji kompetensi							120	120				388	-				323.33	-
	Jumlah pejabat struktural yang mengikuti PKP,PKA, dan PKN Tk.II							48	44				24	-				200	-
	Jumlah CPNS peserta Latsar CPNS							187	228				181	-				-	-
	Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan lulus dengan predikat minimal memuaskan							97%	98%				-	-				-	-

Dari penyajian data kinerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun 2018 – 2023 dapat diinterpretasikan/disimpulkan bahwa indikator–indikator yang telah ditargetkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah terpenuhi, walaupun memang terdapat perubahan indikator kinerja setelah ada evaluasi dari Tim SAKIP Kabupaten.

Selain dapat dilihat dari evaluasi kinerja melalui indikator penilaian yang telah dipaparkan dalam tabel 2.9, kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dapat dilihat pula dari segi penganggaran yaitu sejauh mana penyerapan anggaran yang telah diterima baik program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, yaitu 5 (lima) tahun sebelumnya. Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam konteks anggaran dan realisasi pada tahun 2018-2023, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi anggaran pada Tahun ke					Rasio antara realisasi dan anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran (%)	Realisasi (%)
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.095.689.280	1.198.811.030				995.992.764	773.608.258				90,90	64,53				9,41	(22)
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	39.600.000					37.897.076					95,70					(100,00)	(100)
Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.056.089.280	1.198.811.030				958.095.688	773.608.258				90,72	64,53				13,51	(19)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	244.850.000	15.950.000.000				497.460.791	299.533.951				203,17	1,88				6.414,19	(40)
Pembangunan gedung kantor/bangunan pendukungnya	-	7.850.000.000				-						-					
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100.000.000	7.800.000.000				367.639.120	140.128.800				367,64	1,80				7.700,00	(62)
Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya	35.000.000	150.000.000				33.023.000	125.168.400				94,35	83,45				328,57	279
Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor	39.850.000	60.000.000				34.085.000	23.310.000				85,53	38,85				50,56	(32)
Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional	50.000.000	55.000.000				43.113.671	10.926.751				86,23	19,87				10,00	(75)
Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya	20.000.000	35.000.000				19.600.000	0				98,00	-				75,00	(100)
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan	43.450.000	88.000.000				46.959.000	25.588.000				108,08	29,08				102,53	(46)
Penyusunan rencana strategis SKPD	-	35.000.000				-	-					-					
Penyusunan rencana kerja SKPD	20.000.000	20.000.000				18.234.200	13.055.000				91,17	65,28				-	(28)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi anggaran pada Tahun ke					Rasio antara realisasi dan anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran (%)	Realisasi (%)
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	15.000.000	20.000.000				20.449.800	4.533.000				136,33	22,67				33,33	(78)
Penyusunan laporan keuangan SKPD	8.450.000	13.000.000				8.275.000	8.000.000				97,93	61,54				53,85	(3)
Program Pembinaan Aparatur	417.340.000	542.924.500				373.303.114	121.561.800				89,45	22,39				30,09	(67)
Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Aparatur	188.655.000	-				173.579.543					92,01					(100,00)	(100)
Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Aparatur	-	145.219.500					53.598.000					36,91					
Pembinaan Disiplin Pegawai	68.875.000	-				60.419.161					87,72					(100,00)	(100)
Pembinaan Disiplin Aparatur		73.318.000					18.853.000					25,71					
Peningkatan Kinerja Aparatur	159.810.000	324.387.000				139.304.410	49.110.800				87,17	15,14				102,98	(65)
Program Pengembangan Aparatur	1.288.401.250	2.268.941.250				1.134.664.926	1.807.170.988				88,07	79,65				76,11	59
Pemrosesan CPNS Daerah	299.109.750	-				222.638.500					74,43					(100,00)	(100)
Pemrosesan CPNS Daerah dan PPPK	-	499.109.750					9.715.000					1,95					
Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan ASN dan Penataan Dokumen Arsip Kepegawaian Daerah	377.390.000	477.390.000				466.336.484	157.815.035				123,57	33,06				26,50	(66)
Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara	481.361.500	1.031.361.500				353.291.942	1.624.270.953				73,39	157,49				114,26	360
Fasilitasi Pemrosesan jabatan Fungsional	130.540.000	261.080.000				92.398.000	15.370.000				70,78	5,89				100,00	(83)
Program Peningkatan Karir Aparatur	610.395.000	543.105.000				620.739.479	237.290.160				101,69	43,69				(11,02)	(62)
Penyusunan Rencana Pembinaan Karir Aparatur	271.267.500	182.000.000				298.428.871	69.170.805				110,01	38,01				(32,91)	(77)
Pemrosesan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala PNS	166.155.000	185.605.000				174.503.501	83.672.855				105,02	45,08				11,71	(52)
Fasilitasi Proses Pensiun PNS	172.972.500	175.500.000				147.807.107	84.446.500				85,45	48,12				1,46	(43)
Program Pendidikan, Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Aparatur	5.884.935.500	6.032.044.800				4.710.644.360	2.073.691.895				80,05	34,38				2,50	(56)
Fasilitasi Tugas Belajar	51.100.000	51.100.000				42.993.000	41.040.150				84,14	80,31				-	(5)
Fasilitasi Diklat Prajabatan	3.472.140.000	4.159.740.000				2.271.911.216	972.320.000				65,43	23,37				19,80	(57)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi anggaran pada Tahun ke					Rasio antara realisasi dan anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran (%)	Realisasi (%)
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Fasilitasi Diklat Penjejanan	831.012.250	971.261.000				741.960.450	150.807.000				89,28	15,53				16,88	(80)
Fasilitasi Diklat Teknis/Fungsi onal	608.476.750	696.891.000				1.060.585.686	694.777.445				174,30	99,70				14,53	(34)
Fasilitasi Pengembanga n Diklat	20.869.000	37.492.800				16.275.000	1.600.000				77,99	4,27				79,66	(90)
Fasilitasi Pengembanga n Kompetensi	901.337.500	115.560.000				576.919.008	213.147.300				64,01	184,45				(87,18)	(63)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.662.613.863					6.350.405.178					-			-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah			343.717.300					291.662.550					-			-	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4.001.000					4.000.400					-			-	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			48.116.000					53.052.290					-			-	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			2.730.000					2.728.000					-			-	-
Penyediaan Bahan Logistik			123.340.000					105.329.531					-			-	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			58.958.300					58.934.000					-			-	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			5.580.000					4.640.000					-			-	-
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			100.992.000					62.978.329					-			-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			467.351.000					401.568.546					-			-	-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.681.000					2.680.000					-			-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			118.212.000					90.664.909					-			-	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			346.458.000					308.223.637					-			-	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-					-					-			-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi anggaran pada Tahun ke					Rasio antara realisasi dan anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran (%)	Realisasi (%)
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0					-					-			-	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			168.784.000					307.263.334					-			-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			20.204.000					14.707.430					-			-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			88.580.000					69.104.650					-			-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya			-					-					-			-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			60.000.000					48.381.254					-			-	-
Administrasi kepegawaian perangkat Daerah			-					-					-			-	-
Pengadaan pakain Dinas beserta atribut kelengkapannya			-					-					-			-	-
Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			35.774.000					24.374.900					-			-	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			27.802.000					19.574.900					-			-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPPD			7.972.000					4.800.000					-			-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.646.987.563					5.125.546.998					-			-	-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.634.052.563					5.114.300.398					-			-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Keuangan Akhir Tahun SKPD			3.612.500					3.491.100					-			-	-
Koordinasi dan Penyusunan Lapoan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD			9.322.500					7.755.500					-			-	-
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			6.284.958.200					-					-			-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi anggaran pada Tahun ke					Rasio antara realisasi dan anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran (%)	Realisasi (%)
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			366.496.000					269.581.416					-			-	-
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			74.538.500					42.288.516					-			-	-
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai			229.667.000					138.986.900					-			-	-
Pembinaan Disiplin ASN			62.290.500					88.308.000					-			-	-
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			4.805.767.100					1.980.031.145					-			-	-
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			3.871.906.700					1.224.024.845					-			-	-
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			284.562.100					170.581.000					-			-	-
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			449.848.800					416.705.300					-			-	-
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			199.449.500					168.720.000					-			-	-
Mutasi dan Promosi ASN			1.004.195.600					807.434.896					-			-	-
Pengelolaan Mutasi ASN			294.718.000					109.234.500					-			-	-
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			224.173.100					304.805.100					-			-	-
Pengelolaan Promosi ASN			485.304.500					393.395.296					-			-	-
Pengembangan Kompetensi ASN			108.499.500					104.786.150					-			-	-
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional			65.399.500					47.505.500					-			-	-
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			43.100.000					57.280.650					-			-	-
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			4.614.321.675					3.504.873.225					-			-	-
Pengembangan Kompetensi Teknis			646.747.800					657.529.625					-			-	-
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			634.393.000					639.765.025					-			-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi anggaran pada Tahun ke					Rasio antara realisasi dan anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran (%)	Realisasi (%)
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			12.354.800					17.764.000					-			-	-
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			3.967.573.875					2.847.343.600					-			-	-
Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota			131.110.800					314.437.000					-			-	-
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			670.777.175					603.778.600					-			-	-
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan			3.165.685.900					1.929.128.000					-			-	-
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.444.634.120	8.165.147.241				7.128.861.722					95.76	-	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah				365.652.000	395.359.200				284.909.897					77.92	-	-	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000	6.000.000				3.101.132					62.02	-	-	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				66.080.000	72.688.000				55.198.700					83.53	-	-	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.000.000	4.000.000				2.913.800					97.13	-	-	-
Penyediaan Bahan Logistik				125.000.000	131.000.000				61.962.301					49.57	-	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi anggaran pada Tahun ke					Rasio antara realisasi dan anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran (%)	Realisasi (%)
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				60.000.000	65.000.000				41.804.500					69.67	-	-	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.580.000	5.580.000				4.560.000					81.72	-	-	-
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				100.992.000	111.091.200				115.369.464					114.24	-	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				287.122.600	303.828.730				212.398.906					73.97	-	-	-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000	3.500.000				1.600.000					53.33	-	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				124.122.600	130.328.730				88.984.263					71.69	-	-	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				160.000.000	170.000.000				121.814.643					76.13	-	-	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				105.250.000	105.250.000				280.581.600					266.59	-	-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				105.250.000	105.250.000				280.581.600					266.59	-	-	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				379.223.200	389.934.360				245.489.265					64.73	-	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				21.214.200	22.274.910				12.484.864					58.85	-	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				93.009.000	97.659.450				40.725.001					43.79	-	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya				200.000.000	200.000.000				147.047.200					73.52	-	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				65.000.000	70.000.000				45.232.200					69.59	-	-	-
Administrasi kepegawaian perangkat Daerah				27.000.000	27.000.000				14.100.000					52.22	-	-	-
Pengadaan pakain Dinas beserta atribut kelengkapannya				27.000.000	27.000.000				14.100.000					52.22	-	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi anggaran pada Tahun ke					Rasio antara realisasi dan anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran (%)	Realisasi (%)
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50.000.000	90.000.000				18.601.849					37.20	-	-	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				20.000.000	55.000.000				4.968.500					24.84	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPPD				30.000.000	35.000.000				13.633.349					45.44	-	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.226.886.320	6.850.274.951				6.072.415.205					97.52	-	-	-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.211.686.320	6.832.854.951				5.906.527.205					95.09	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4.397.500	5.137.500				163.248.000					3712.29	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Lapoan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD				10.802.500	12.282.500				1.800.000					16.66	-	-	-
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				6.768.649.940	7.127.577.422				1.631.818.967					24.11	-	-	-
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				558.344.500	598.658.500				257.212.500					46.07	-	-	-
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				81.992.000	90.191.000				21.877.000					26.68	-	-	-
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai				262.633.000	287.896.000				160.396.500					61.07	-	-	-
Pembinaan Disiplin ASN				213.719.500	220.571.500				74.939.000					35.06	-	-	-
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				4.930.341.240	5.110.958.302				604.318.184					12.26	-	-	-
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				65.000.000	70.000.000				41.272.500					63.50	-	-	-
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				4.200.000.000	4.350.000.000				168.030.385					4.00	-	-	-
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				472.341.240	495.958.302				115.854.277					24.53	-	-	-
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				193.000.000	195.000.000				279.161.022					144.64	-	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi anggaran pada Tahun ke					Rasio antara realisasi dan anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran (%)	Realisasi (%)
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Mutasi dan Promosi ASN				1.133.024.750	1.248.827.225				687.919.307					60.72	-	-	-
Pengelolaan Mutasi ASN				324.189.800	356.608.780				219.549.200					67.72	-	-	-
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				275.000.000	305.000.000				140.388.807					51.05	-	-	-
Pengelolaan Promosi ASN				533.834.950	587.218.445				327.981.300					61.44	-	-	-
Pengembangan Kompetensi ASN				146.939.450	169.133.395				82.368.976					56.06	-	-	-
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional				71.939.450	79.133.395				31.380.898					43.62	-	-	-
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN				75.000.000	90.000.000				50.988.078					67.98	-	-	-
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				3.869.711.000	4.122.331.600				3.869.127.489					99.98	-	-	-
Pengembangan Kompetensi Teknis				941.869.000	802.271.000				1.351.574.989					143.50	-	-	-
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				892.250.000	719.185.000				1.341.606.989					150.36	-	-	-
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				49.619.000	83.086.000				1.351.574.989					2723.91	-	-	-
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				2.927.842.000	3.320.060.600				2.517.552.500					85.99	-	-	-
Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota				684.585.000	722.820.000				897.258.500					131.07	-	-	-
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1.144.220.000	1.141.920.000				656.274.000					57.36	-	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi anggaran pada Tahun ke					Rasio antara realisasi dan anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran (%)	Realisasi (%)
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1.099.037.000	1.455.320.600				964.020.000					87.71	-	-	-
JUMLAH								-	-	-			-	-	-		

2.4 Kelompok Sasaran Layanan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, kelompok sasaran Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang serta masyarakat umum khususnya para pensiunan.

Dalam rangka menunjang kelancaran pemberian layanan kepada aparatur sipil negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bermitra dengan Badan Kepegawian Negara, Badan Kepegawaian Negara Kantor Wilayah II, Perguruan Tinggi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) serta PT. TASPEN.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berkedudukan sebagai unsur penunjang urusan Pemerintahan dibidang kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah sesuai dengan ketentuan peraruran perundang-undangan.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selama kurun waktu lima tahun sebelumnya, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dapat dilihat pada table 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Profesionalitas ASN masih rendah	Indeks Profesionalitas ASN masih rendah	Rendahnya Indeks Dimensi Kompetensi
2.	Implementasi Sistem Merit belum optimal	Kualitas Data ASN Belum Optimal	Rendahnya kesadaran ASN dalam mengupdate Data Kepegawaian dan Pengembangan Kompetensi
		Nilai sistem merit belum optimal	Belum optimalnya pelaksanaan Perbup Pola Karir
		Penempatan ASN masih ada yang belum sesuai dengan standart kompetensi jabatan	Pelaksanaan assment ASN masih dikerjasamakan dengan pihak lain sehingga diperlukan biaya tinggi
		Disiplin ASN kurang optimal	Pemahaman, kesadaran dan kepatuhan tentang aturan disiplin PNS masih kurang

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
		Masih adanya ASN yang berkinerja dibawah baik	Adanya perubahan kebijakan dari pusat berkaitan dengan penilaian kinerja pegawai
		Pengurangan Jumlah ASN Karena Pensiun Setiap Tahunnya	Pengadaan ASN Menunggu Kebijakan Pusat
		Pelayanan Kesejahteraan Pegawai Belum Optimal	Pelaksanaan Manajemen Kesejahteraan Pegawai Belum Optimal (Penghargaan, Sakit, ASN Rentan Cek Up Rutin Kesehatan)
		Kebijakan pengembangan kompetensi pejabat fungsional terutama hasil penyetaraan belum optimal	Pejabat fungsional hasil penyetaraan belum mendapatkan pendidikan dan pelatihan akan jabatannya

3.2. Isu Strategis

Mendasar pada hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta analisis atas capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya, maka dapat diambil benang merah isu-isu strategis pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

- 1. Profesionalitas ASN masih rendah;
- 2.Implementasi Sistem Merit Belum Optimal

Dalam rangka menghadapi Isu-isu strategis diatas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia perlu melakukan beberapa upaya penanganan melalui beberapa program sebagaimana amanah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 antara lain :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

- b. Program Kepegawaian Daerah; dan
- c. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Setiap program memiliki indicator sebagai tolak ukur keberhasilan. Dan Setiap program didukung dengan kegiatan dan sub kegiatan dalam pelaksanaannya. Secara lebih rinci program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indicator capaiannya akan diterangkan pada pada bab selanjutnya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tujuan adalah pernyataan yang berisi mengenai hal-hal yang perlu dilakukan untuk dapat memecahkan masalah dan menangani isu strategis sehingga sekaligus dapat melaksanakan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam masa mengisi kekosongan pimpinan daerah yang berakhir pada tahun 2023, mendasar pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang 2024-2026, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang mempunyai tujuan **“Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi”** dengan indikator capaiannya adalah **“Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten”** dan **“Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah”**.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Mendasar pada tujuan yang ingin dicapai maka sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Renstra Tahun 2024-2026 ditetapkan sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah; dan
- 2. Meningkatkan Kualitas Manajemen ASN.

Pemaparan mengenai keselarasan tujuan dan sasaran di atas, dapat dilihat dalam bentuk tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada tahun ke		
				1	2	3
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	-	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten	69	72	75
		-	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	72	73	74
		Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	A (81,05)	A (81,05)	A (81,05)
		Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN	Indeks Profesionalitas ASN	61,5	61,82	62,15
			Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit	304	312,5	320,5

4.2. Cascading Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penyusunan Renstra Perangkat harus memperhatikan sinkronisasi dan keselarasan tujuan, sasaran dan program perangkat daerah, dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Cascading Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Cascading Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR SASARAN RPD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik	Indeks Good Governance (IGG)	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten								
						Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN	Indeks Profesionalitas ASN						
							Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit						
								Kepegawaian Daerah	Nilai Penerapan Sistem Merit Bidang Kepegawaian				
										Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Nilai Penerapan Sistem Merit Kewenangan Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Sistem Informasi Kepegawaian		
												Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR SASARAN RPD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
												Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
										Mutasi dan Promosi ASN	Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya		
											Nilai Penerapan Sistem Merit Kewenangan Bidang Pengembangan Karir		
												Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah
												Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
												Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN
										Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mendapatkan peningkatan kompetensi		
												Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR SASARAN RPD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												Fasilitasi Pengembangan Karir dalam jabatan fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir
										Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang berkinerja minimal baik		
											Persentase Penangan Pelanggaran disiplin ASN tahun berkenaan		
											Nilai Penerapan Sistem Merit Kewenangan Bidang Kinerja		
												Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
												Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan
												Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan
								Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai Penerapan Sistem Merit Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia				
										Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis sesuai dengan kebutuhan		

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR SASARAN RPD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi
												Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
										Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase aparatur yang lulus sertifikasi pengembangan kompetensi manajerial/dasar		
											Nilai Penerapan Sistem Merit Kewenangan Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur		

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR SASARAN RPD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota
												Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
												Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama
				Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi BKPSDM								

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR SASARAN RPD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah						
								Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur BKPSDM				
										Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan		
												Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
												Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
										Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu		
											Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan		

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR SASARAN RPD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
												Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
												Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
												Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD
										Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaporan aset yang tersusun sesuai aturan		
												Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
										Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR SASARAN RPD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
												Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
												Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga PD yang terfasilitasi
												Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
												Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
												Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
												Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
										Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah		

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR SASARAN RPD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
												Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
										Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur		
												Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
										Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik		
isi dan perangkat												Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
												Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR SASARAN RPD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
												Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi
										Administrasi kepegawaian perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD		
												Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan, terutama bagi layanan langsung pada masyarakat dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis yang ada yang bisa menjadi peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Tantangan dan peluang Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Tantangan

1. Tuntutan peningkatan kinerja aparatur.
2. Jumlah ASN yang mengalami kekurangan pada berbagai jabatan.
3. Perlunya terus-menerus meningkatkan dan mengembangkan kompetensi ASN dengan pendidikan dan pelatihan ASN.
4. Peningkatan layanan kepegawaian secara lebih mudah dan sederhana kepada ASN Pemerintah Kabupaten Jombang seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (revolusi industry 4.0).
5. Penataan ASN sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya.

2. Peluang

1. Tersedianya aplikasi layanan elektronik dan pengelolaan data elektronik yang telah dirintis sangat membantu manajemen perencanaan dan peningkatan pelayanan kepegawaian.
2. Pengadaan pegawai akan mewujudkan/meminimalisasi kekurangan jumlah kuantitas pegawai.
3. Analisa kebutuhan diklat memberikan peluang untuk memprogramkan jenis diklat yang sesuai kebutuhan.

Pada Tabel 5.1 digambarkan keselarasan tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang dilakukan selama periode tiga tahun mendatang.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran Strategis dan Kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	1. Pemenuhan capaian kinerja aparatur BKPSDM	1. Penuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja. 2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah. 3. Penyusunan administrasi barang milik daerah. 4. Penuhan pelayanan administrasi perkantoran. 5. Penuhan pengadaan barang milik daerah. 6. Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran. 7. Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran. 8. Pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah.
	2. Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN	1. Peningkatan Penerapan Sistem Merit Bidang Kepegawaian	1. Pengadaan, Pemberhentian dan Pengelolaan Informasi Kepegawaian ASN 2. Pengelolaan layanan Mutasi, Promosi dan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Kenaikan Pangkat ASN 3. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 4. Fasilitasi Pengembangan Karir jabatan Fungsional 5. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 6. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai 7. Pembinaan Disiplin ASN
		2. Peningkatan Penerapan Sistem Merit Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Peningkatan kompetensi teknis aparatur 2. Peningkatan kompetensi manajerial/dasar aparatur

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan uraian tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang pada BAB sebelumnya, yang kemudian *dibreak down* ke dalam rumusan strategi dan arah kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun masa Renstra, maka disusun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Pencapaian Rencana Pembangunan Daerah dapat dikatakan berhasil apabila pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan telah memenuhi target dan indikator kinerja yang telah ditentukan.

Selain penyusunan target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang selama 3 (tiga) tahun, juga telah disusun pendanaan indikatif untuk masing-masing program, kegiatan maupun sub kegiatan, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN JOMBANG

Mendasar pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rensrra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi				Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten		69		72		75					Jombang
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah			Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	A	A	7.970.311.600	A	8.753.826.300	A	9.410.669.500	A	26.134.807.400	BKPSDM	Jombang
		5.03.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur BKPSDM	91%	93%	7.735.215.000	94%	8.517.894.500	95%	9.171.982.300	95%	25.425.091.800	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	60.000.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	15.000.000	3 dokumen	15.000.000	2 dokumen	15.000.000	8 dokumen	45.000.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	5 laporan	5.000.000	5 laporan	5.000.000	5 laporan	5.000.000	15 laporan	15.000.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	98%	100%	6.459.534.915	100%	7.246.129.100	100%	7.952.216.900	100%	21.657.880.915	BKPSDM	Jombang
				Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		
		5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/Bln	48 Orang/Bln	6.289.031.415	48 Orang/Bln	7.063.995.100	48 Orang/Bln	7.769.732.400	48 Orang/Bln	21.122.758.915	BKPSDM	Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rensrra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 dokumen	4 dokumen	166.998.000	4 dokumen	178.278.000	4 dokumen	178.278.000	12 dokumen	523.554.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 laporan	5 laporan	1.059.000	5 laporan	1.164.800	5 laporan	1.270.700	15 laporan	3.494.500	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 laporan	16 laporan	2.446.500	16 laporan	2.691.200	16 laporan	2.935.800	48 laporan	8.073.500	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaporan aset yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	500.000	100%	500.000	100%	500.000	100%	1.500.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1 laporan	12 laporan	500.000	12 laporan	500.000	12 laporan	500.000	36 laporan	1.500.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD	0	95%	33.600.000	95%	33.600.000	95%	33.600.000	95%	100.800.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.05.01	Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	0	96 Stel	33.600.000	96 Stel	33.600.000	96 Stel	33.600.000	288 Stel	100.800.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	412.365.700	100%	415.279.400	100%	418.279.400	100%	1.245.924.500	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.784.000	1 Paket	6.784.000	1 Paket	6.784.000	3 Paket	20.352.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	4 Paket	78.990.000	4 Paket	80.000.000	4 Paket	82.000.000	12 Paket	240.990.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga PD yang terfasilitasi	3 Paket	1 Paket	2.080.000	1 Paket	2.080.000	1 Paket	2.080.000	3 Paket	6.240.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3 Paket	143.110.000	3 Paket	145.000.000	3 Paket	146.000.000	9 Paket	434.110.000	BKPSDM	Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rensrra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	83.000.000	2 Paket	83.013.700	2 Paket	83.013.700	6 Paket	249.027.400	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	4.906.200	3 Paket	4.906.200	3 Paket	4.906.200	9 Paket	14.718.600	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	93.495.500	12 laporan	93.495.500	12 laporan	93.495.500	36 laporan	280.486.500	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	95%	95%	286.800.000	95%	266.000.000	95%	211.000.000	95%	763.800.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	65 Unit	286.800.000	17 Unit	266.000.000	9 Unit	211.000.000	91 Unit	763.800.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	241.730.985	100%	255.702.600	100%	255.702.600	100%	753.136.185	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	37 laporan	101.690.985	37 laporan	101.658.600	37 laporan	101.658.600	111 laporan	305.008.185	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	4 laporan	140.040.000	4 laporan	154.044.000	4 laporan	154.044.000	12 laporan	448.128.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	95%	95%	280.683.400	95%	280.683.400	95%	280.683.400	95%	842.050.200	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	41.010.000	1 Unit	41.010.000	1 Unit	41.010.000	3 Unit	123.030.000	BKPSDM	Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rensrra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	26 Unit	109.643.400	26 Unit	109.643.400	26 Unit	109.643.400	26 Unit	328.930.200	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0	1 Unit	80.000.000	1 Unit	80.000.000	1 Unit	80.000.000	3 Unit	240.000.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	46 Unit	119 Unit	50.030.000	119 Unit	50.030.000	119 Unit	50.030.000	357 Unit	150.090.000	BKPSDM	Jombang
	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN	5.03.02		Indeks Profesionalitas ASN	64 poin	61,5 poin	14.472.322.600	61,82 poin	16.506.225.000	62,15 poin	17.133.769.000	62,15 poin	48.112.316.600	BKPSDM	Jombang
				Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit	275 poin	304 poin		312,5 poin		320,5 poin		320,5 poin			
		5.03.02.2	Kepegawaian Daerah	Nilai Penerapan Sistem Merit Bidang Kepegawaian	239.5 poin	267 Poin	3.308.101.900	273 Poin	3.822.530.000	279 Poin	4.029.008.000	279 Poin	11.159.639.900	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Nilai Penerapan Sistem Merit Kewenangan Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Sisitem Informasi Kepegawaian	92 poin	93 Poin	1.631.215.900	94 Poin	1.957.200.000	95 Poin	2.038.810.000	95 Poin	5.627.225.900	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 dokumen	2 dokumen	1.200.215.900	2 dokumen	1.300.950.000	2 dokumen	1.365.997.500	6 dokumen	3.867.163.400	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	595 dokumen	1 dokumen	305.000.000	1 dokumen	525.000.000	1 dokumen	535.000.000	3 dokumen	1.365.000.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen	126.000.000	1 dokumen	131.250.000	1 dokumen	137.812.500	3 dokumen	395.062.500	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya	0	81%	809.886.000	81,25%	979.330.000	81,50%	1.084.098.000	81,50%	2.873.314.000	BKPSDM	Jombang
				Nilai Penerapan Sistem Merit Kewenangan Bidang Pengembangan Karir	0	67,5 Poin	-	70 Poin	-	72,5 Poin	-	72,5 Poin	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rensrra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	168 (Mutasi antar daerah=25, SK Pemberhentian=5, SK Mutasi Staf=135, SK Tugas Instansi Lain=3)	4 dokumen	214.886.000	4 dokumen	236.374.000	4 dokumen	260.015.000	12 dokumen	711.275.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	5.208 (KP=1.150, Berkala=4.058, Ujian KPPI=150)	5 dokumen	205.000.000	5 dokumen	341.600.000	5 dokumen	382.592.000	15 dokumen	929.192.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	3 (selter=1x, pelantikan=2x)	2 dokumen	390.000.000	2 dokumen	401.356.000	2 dokumen	441.491.000	6 dokumen	1.232.847.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mendapatkan peningkatan kompetensi	84 Poin	84,5 Poin	188.000.000	84,75 Poin	207.000.000	85 Poin	227.100.000	85 Poin	622.100.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	72 orang	50 orang	110.000.000	50 orang	121.000.000	50 orang	133.100.000	150 orang	364.100.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	400 orang	600 orang	78.000.000	600 orang	86.000.000	600 orang	94.000.000	1800 orang	258.000.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang berkinerja minimal baik	91%	75%	679.000.000	77%	679.000.000	80%	679.000.000	91%	2.037.000.000	BKPSDM	Jombang
				Persentase Penangan Pelanggaran disiplin ASN tahun berkenaan	90%	90%	-	93%	-	95%	-	95%	-		
				Nilai Penerapan Sistem Merit Kewenangan Bidang Kinerja	104 poin	106,5 poin	-	109 poin	-	111,5 poin	-	111,5 poin	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rensrra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	8563 dokumen	5 dokumen	76.500.000	5 dokumen	76.500.000	5 dokumen	76.500.000	15 dokumen	229.500.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	1332 orang	303 orang	196.500.000	303 orang	196.500.000	303 orang	196.500.000	909 orang	589.500.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	16 orang	50 orang	406.000.000	50 orang	406.000.000	50 orang	406.000.000	150 orang	1.218.000.000	BKPSDM	Jombang
		5.04.02	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai Penerapan Sistem Merit Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	25.5 poin	37 Poin	3.306.262.000	39,5 Poin	3.929.868.700	41,5 Poin	3.694.091.500	41,5 Poin	10.930.222.200	BKPSDM	Jombang
		5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis sesuai dengan kebutuhan	100%	100%	918.071.500	100%	856.572.200	100%	942.229.500	100%	2.716.873.200	BKPSDM	Jombang
		5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	201 orang	241 orang	887.571.500	289 orang	825.000.000	346 orang	907.500.000	876 orang	2.620.071.500	BKPSDM	Jombang
		5.04.02.2.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	2 dokumen	2 dokumen	30.500.000	2 dokumen	31.572.200	2 dokumen	34.729.500	6 dokumen	96.801.700	BKPSDM	Jombang
		5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase aparatur yang lulus sertifikasi pengembangan kompetensi manajerial/dasar	100%	100%	2.388.190.500	100%	3.073.296.500	100%	2.751.862.000	100%	8.213.349.000	BKPSDM	Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rensrra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Nilai Penerapan Sistem Merit Kewenangan Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur	34.5 poin	37 Poin	-	39,5 poin	-	41,5 Poin	-	41,5 Poin	-		
		5.04.02.2.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	265 orang	145 orang	415.500.000	322 orang	922.696.500	265 orang	759.362.000	732 orang	2.097.558.500	BKPSDM	Jombang
		5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 laporan	3 laporan	1.290.690.500	3 laporan	940.800.000	3 laporan	987.840.000	9 laporan	3.219.330.500	BKPSDM	Jombang
		5.04.02.2.02.08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	50 dokumen	2 dokumen	682.000.000	2 dokumen	1.209.800.000	2 dokumen	1.004.660.000	6 dokumen	2.896.460.000	BKPSDM	Jombang

Mendasar pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rensrra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi				Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten		69		72		75					Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rensrra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah			Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	A	A	7.970.311.600	A	8.753.826.300	A	9.410.669.500	A	26.134.807.400	BKPSDM	Jombang
		5.03.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur BKPSDM	91%	93%	7.735.215.000	94%	8.517.894.500	95%	9.171.982.300	95%	25.425.091.800	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	60.000.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	15.000.000	3 dokumen	15.000.000	2 dokumen	15.000.000	8 dokumen	45.000.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	5 laporan	5.000.000	5 laporan	5.000.000	5 laporan	5.000.000	15 laporan	15.000.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	98%	100%	6.459.534.915	100%	7.246.129.100	100%	7.952.216.900	100%	21.657.880.915	BKPSDM	Jombang
				Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		
		5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/Bln	48 Orang/Bln	6.289.031.415	48 Orang/Bln	7.063.995.100	48 Orang/Bln	7.769.732.400	48 Orang/Bln	21.122.758.915	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 dokumen	4 dokumen	166.998.000	4 dokumen	178.278.000	4 dokumen	178.278.000	12 dokumen	523.554.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 laporan	5 laporan	1.059.000	5 laporan	1.164.800	5 laporan	1.270.700	15 laporan	3.494.500	BKPSDM	Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rensrra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 laporan	16 laporan	2.446.500	16 laporan	2.691.200	16 laporan	2.935.800	48 laporan	8.073.500	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaporan aset yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	500.000	100%	500.000	100%	500.000	100%	1.500.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1 laporan	12 laporan	500.000	12 laporan	500.000	12 laporan	500.000	36 laporan	1.500.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD	0	95%	33.600.000	95%	33.600.000	95%	33.600.000	95%	100.800.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.05.0001	Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	0	96 Stel	33.600.000	96 Stel	33.600.000	96 Stel	33.600.000	288 Stel	100.800.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	412.365.700	100%	415.279.400	100%	418.279.400	100%	1.245.924.500	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.784.000	1 Paket	6.784.000	1 Paket	6.784.000	3 Paket	20.352.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	4 Paket	78.990.000	4 Paket	80.000.000	4 Paket	82.000.000	12 Paket	240.990.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga PD yang terfasilitasi	3 Paket	1 Paket	2.080.000	1 Paket	2.080.000	1 Paket	2.080.000	3 Paket	6.240.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3 Paket	143.110.000	3 Paket	145.000.000	3 Paket	146.000.000	9 Paket	434.110.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	83.000.000	2 Paket	83.013.700	2 Paket	83.013.700	6 Paket	249.027.400	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	4.906.200	3 Paket	4.906.200	3 Paket	4.906.200	9 Paket	14.718.600	BKPSDM	Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rensrra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	93.495.500	12 laporan	93.495.500	12 laporan	93.495.500	36 laporan	280.486.500	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	95%	95%	286.800.000	95%	266.000.000	95%	211.000.000	95%	763.800.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	65 Unit	286.800.000	17 Unit	266.000.000	9 Unit	211.000.000	91 Unit	763.800.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	241.730.985	100%	255.702.600	100%	255.702.600	100%	753.136.185	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	37 laporan	101.690.985	37 laporan	101.658.600	37 laporan	101.658.600	111 laporan	305.008.185	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	4 laporan	140.040.000	4 laporan	154.044.000	4 laporan	154.044.000	12 laporan	448.128.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	95%	95%	280.683.400	95%	280.683.400	95%	280.683.400	95%	842.050.200	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	41.010.000	1 Unit	41.010.000	1 Unit	41.010.000	3 Unit	123.030.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	26 Unit	109.643.400	26 Unit	109.643.400	26 Unit	109.643.400	26 Unit	328.930.200	BKPSDM	Jombang
		5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0	1 Unit	80.000.000	1 Unit	80.000.000	1 Unit	80.000.000	3 Unit	240.000.000	BKPSDM	Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rensrra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	46 Unit	119 Unit	50.030.000	119 Unit	50.030.000	119 Unit	50.030.000	357 Unit	150.090.000	BKPSDM	Jombang
	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN	5.03.02		Indeks Profesionalitas ASN	64 poin	61,5 poin	14.472.322.600	61,82 poin	16.506.225.000	62,15 poin	17.133.769.000	62,15 poin	48.112.316.600	BKPSDM	Jombang
				Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit	275 poin	304 poin		312,5 poin		320,5 poin		320,5 poin			
		5.03.02.2	Kepegawaian Daerah	Nilai Penerapan Sistem Merit Bidang Kepegawaian	239.5 poin	267 Poin	3.308.101.900	273 Poin	3.822.530.000	279 Poin	4.029.008.000	279 Poin	11.159.639.900	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Nilai Penerapan Sistem Merit Kewenangan Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Sisitem Informasi Kepegawaian	92 poin	93 Poin	1.631.215.900	94 Poin	1.957.200.000	95 Poin	2.038.810.000	95 Poin	5.627.225.900	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 dokumen	2 dokumen	1.200.215.900	2 dokumen	1.300.950.000	2 dokumen	1.365.997.500	6 dokumen	3.867.163.400	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	595 dokumen	1 dokumen	305.000.000	1 dokumen	525.000.000	1 dokumen	535.000.000	3 dokumen	1.365.000.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen	126.000.000	1 dokumen	131.250.000	1 dokumen	137.812.500	3 dokumen	395.062.500	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya	0	81%	809.886.000	81,25%	979.330.000	81,50%	1.084.098.000	81,50%	2.873.314.000	BKPSDM	Jombang
				Nilai Penerapan Sistem Merit Kewenangan Bidang Pengembangan Karir	0	67,5 Poin	-	70 Poin	-	72,5 Poin	-	72,5 Poin	-		
		5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	168 (Mutasi antar daerah=25, SK Pemberhentian=5, SK Mutasi Staf=135, SK Tugas Instansi Lain=3)	4 dokumen	214.886.000	4 dokumen	236.374.000	4 dokumen	260.015.000	12 dokumen	711.275.000	BKPSDM	Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rensrra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	5.208 (KP=1.150, Berkala=4.0 58, Ujian KPPI=150)	5 dokumen	205.000.000	5 dokumen	341.600.000	5 dokumen	382.592.000	15 dokumen	929.192.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	3 (selter=1x, pelantikan= 2x)	2 dokumen	390.000.000	2 dokumen	401.356.000	2 dokumen	441.491.000	6 dokumen	1.232.847.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mendapatkan peningkatan kompetensi	84 Poin	84,5 Poin	188.000.000	84,75 Poin	207.000.000	85 Poin	227.100.000	85 Poin	622.100.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	72 orang	50 orang	110.000.000	50 orang	121.000.000	50 orang	133.100.000	150 orang	364.100.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	400 orang	600 orang	78.000.000	600 orang	86.000.000	600 orang	94.000.000	1800 orang	258.000.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang berkinerja minimal baik	91%	75%	679.000.000	77%	679.000.000	80%	679.000.000	91%	2.037.000.000	BKPSDM	Jombang
				Persentase Penangan Pelanggaran disiplin ASN tahun berkenaan	90%	90%	-	93%	-	95%	-	95%	-		
				Nilai Penerapan Sistem Merit Kewenangan Bidang Kinerja	104 poin	106,5 poin	-	109 poin	-	111,5 poin	-	111,5 poin	-		
		5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	8563 dokumen	5 dokumen	76.500.000	5 dokumen	76.500.000	5 dokumen	76.500.000	15 dokumen	229.500.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	1332 orang	303 orang	196.500.000	303 orang	196.500.000	303 orang	196.500.000	909 orang	589.500.000	BKPSDM	Jombang
		5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	16 orang	50 orang	406.000.000	50 orang	406.000.000	50 orang	406.000.000	150 orang	1.218.000.000	BKPSDM	Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rensrra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5.04.02	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai Penerapan Sistem Merit Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	25.5 poin	37 Poin	3.306.262.000	39,5 Poin	3.929.868.700	41,5 Poin	3.694.091.500	41,5 Poin	10.930.222.200	BKPSDM	Jombang
		5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis sesuai dengan kebutuhan	100%	100%	918.071.500	100%	856.572.200	100%	942.229.500	100%	2.716.873.200	BKPSDM	Jombang
		5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	201 orang	241 orang	887.571.500	289 orang	825.000.000	346 orang	907.500.000	876 orang	2.620.071.500	BKPSDM	Jombang
		5.04.02.2.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	2 dokumen	2 dokumen	30.500.000	2 dokumen	31.572.200	2 dokumen	34.729.500	6 dokumen	96.801.700	BKPSDM	Jombang
		5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase aparatur yang lulus sertifikasi pengembangan kompetensi manajerial/dasar	100%	100%	2.388.190.500	100%	3.073.296.500	100%	2.751.862.000	100%	8.213.349.000	BKPSDM	Jombang
				Nilai Penerapan Sistem Merit Kewenangan Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur	34.5 poin	37 Poin	-	39,5 poin	-	41,5 Poin	-	41,5 Poin	-		
		5.04.02.2.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	265 orang	145 orang	415.500.000	322 orang	922.696.500	265 orang	759.362.000	732 orang	2.097.558.500	BKPSDM	Jombang
		5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 laporan	3 laporan	1.290.690.500	3 laporan	940.800.000	3 laporan	987.840.000	9 laporan	3.219.330.500	BKPSDM	Jombang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rensrra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5.04.02.2.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	50 dokumen	2 dokumen	682.000.000	2 dokumen	1.209.800.000	2 dokumen	1.004.660.000	6 dokumen	2.896.460.000	BKPSDM	Jombang

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang merupakan penjabaran perencanaan pembangunan dalam upaya mewujudkan tujuan, baik skala nasional maupun daerah. Oleh karena itu Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki kesinambungan dengan dokumen daerah terkait, salah satunya yaitu Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026. Dapat dikatakan bahwa dengan pelaksanaan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang mampu membantu pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 sehingga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menentukan target kinerja dalam konteks pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026, sebagai berikut :

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	A (80,68)	A (81,05)	A (81,05)	A (81,05)	A (81,05)
2	Indeks Profesionalitas ASN	60,43 Poin	61,5 Poin	61,82 Poin	62,15 Poin	62,15 Poin
3	Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit	270 Poin	304 Poin	312,5 Poin	320,5 Poin	320,5 Poin
4	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur BKPSDM	90%	93%	94%	95%	95%
5	Nilai Penerapan Sistem Merit Bidang Kepegawaian	239,5 Poin	267 Poin	273 Poin	279 Poin	279 Poin
6	Nilai Penerapan Sistem Merit Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	25,5 Poin	37 Poin	39,5 Poin	41,5 Poin	41,5 Poin

Tabel 7.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN JOMBANG

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan/Penjelasan	Sumber Data	Penanggungjawab
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP BKPSDM dari Tim SAKIP Kabupaten pada tahun berkenaan	1. Dokumen AKIP dan evaluasinya	Kepala BKPSDM
Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Jumlah total nilai 4 dimensi pembentuk Indeks Profesionalitas ASN: 1. Dimensi Kualifikasi 2. Dimensi Kompetensi 3. Dimensi Kinerja 4. Dimensi Disiplin	1. Hasil perhitungan BKN	Kepala BKPSDM
	Hasil penilaian penerapan sistem merit	Jumlah skor penilaian 8 aspek penerapan sistem merit: 1. Aspek Perencanaan kebutuhan 2. Aspek Pengadaan 3. Aspek Pengembangan karir 4. Aspek Promosi dan mutasi 5. Aspek Manajemen kinerja 6. Aspek Penggajian, penghargaan dan disiplin 7. Aspek Perlindungan dan pelayanan 8. Aspek Sistem Informasi	1. Laporan pelaksanaan penyusunan formasi, pengadaan ASN dan sistem informasi 2. Laporan rekapitulasi penilaian kinerja, penghargaan dan kesejahteraan seluruh ASN 3. Laporan pengembangan karir, mutasi, penempatan	Kepala BKPSDM

			jabatan ASN dan pelaksanaan promosi dan rotasi	
			4. Hasil penilaian Penerapan Sistem Merit Kabupaten Jombang dari KASN	

Tabel 7.3
INDIKATOR KINERJA KUNCI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN JOMBANG

Kinerja Kunci	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan/Penjelasan	Sumber Data	Penanggungjawab
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten	Nilai Reformasi Birokrasi Kabupaten pada tahun berkenaan	Hasil Penilaian Kementrian PAN/RB	Kepala BKPSDM
	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten	Nilai Reformasi Birokrasi oleh Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten pada tahun berkenaan	Hasil Penilaian Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten	Kepala BKPSDM

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang Tahun 2024 – 2026 akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang yang akan menjadi selama kurun waktu 3 (tiga) tahun yang akan datang. Program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang disusun berdasarkan orientasi penyediaan pelayanan kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Jombang.

Oleh karena itu dengan tersusunnya dokumen Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang ini, diharapkan adanya keteraturan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta dapat mewujudkan sinergitas kinerja Badan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang dengan pihak atau instansi terkait kepegawaian dan pengembangan kompetensi lainnya, baik di tingkat daerah maupun pusat.

Jombang, 27 Juni 2023

**Kepala Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Jombang**



BAMBANG SUNTOWO, SE., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19670904 199202 1 002